

Peranan Jamkrida Bali Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Provinsi Bali

Sagung Oka Pradnyawati
sagungoka@unmas.ac.id
Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

Abstrak

UMKM memiliki kontribusi strategis dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di Provinsi Bali yang didominasi oleh sektor informal dan pariwisata. Namun, akses terhadap pembiayaan masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagai lembaga penjamin kredit dalam meningkatkan kinerja UMKM di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-verifikatif melalui distribusi kuesioner kepada UMKM terjamin sektor produktif di seluruh kabupaten/kota di Bali. Analisis data menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan kredit dan non-kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan layanan JBM. Selanjutnya, layanan JBM secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja dan pertumbuhan UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa skema penjaminan yang dikelola Jamkrida Bali efektif dalam memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan usaha produktif. Temuan ini memperkuat urgensi penguatan kapasitas lembaga penjaminan dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh.

Kata kunci: UMKM, Penjaminan Kredit dan non kredit, Layanan JBM, Kinerja UMKM, Jamkrida Bali Mandara

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses alami dalam mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara adil serta merata. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pembangunan harus mampu meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, kreativitas, serta solidaritas antarwarga negara. Selain itu, pembangunan juga harus mendorong kemerdekaan individu yang berfungsi sosial, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Todaro & Smith, 2020). Setiap negara memiliki tujuan utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa, yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan ekonomi adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta kelembagaan nasional. Selain itu, pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan, mengurangi ketimpangan sosial, serta memberantas kemiskinan absolut.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Strategi pembangunan yang diterapkan mencakup peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan

lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan di berbagai wilayah. Menurut Sukirno (2019), pembangunan ekonomi di negara berkembang harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat daya saing industri, dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus menggencarkan berbagai kebijakan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor ekonomi digital.

Salah satu indikator utama dalam menilai pembangunan ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB diartikan sebagai total nilai atau harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. PDB menjadi parameter penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Apabila PDB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian negara tersebut mengalami perbaikan dan pertumbuhan yang positif (Mankiw, 2021). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, salah satu strategi pembangunan yang diterapkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Konsep pemberdayaan atau *empowerment* menekankan pada otonomi pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat berbasis sumber daya yang dimiliki. Friedman (2021) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui partisipasi aktif, demokrasi ekonomi, serta pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Di Indonesia, UMKM memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi, terutama saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, di mana sektor ini mampu bertahan sementara banyak usaha besar mengalami kebangkrutan akibat fluktuasi nilai tukar dan beban utang yang tinggi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi momentum bagi pergeseran kebijakan ekonomi yang lebih mendukung pengembangan UMKM. Harapan (2014) menjelaskan bahwa sebelum krisis, struktur ekonomi Indonesia lebih berpihak pada industri besar, yang kemudian runtuh akibat tingginya beban finansial. Setelah krisis, perhatian terhadap UMKM meningkat pesat karena tiga alasan utama: (1) UMKM terbukti lebih tangguh dalam menyerap tenaga kerja produktif, (2) UMKM lebih adaptif terhadap inovasi dan teknologi, serta (3) UMKM lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar dibandingkan dengan usaha besar (Rahayu, 2020). Pemerintah telah mengalokasikan berbagai sumber daya untuk mendukung pertumbuhan UMKM, mulai dari program kredit lunak, bantuan modal usaha, hingga pelatihan manajemen bisnis. Namun, meskipun terdapat banyak dukungan, UMKM masih menghadapi berbagai kendala besar, seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia (SDM), inovasi produk, teknologi, serta akses pemasaran. Neeley dan Van Auken (2021) menekankan bahwa kendala utama dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal eksternal, yang disebabkan oleh asimetri informasi, biaya transaksi tinggi, serta sistem kredit yang tidak fleksibel. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Interactive Crew (2019) dan Permana (2020), yang menyimpulkan bahwa masalah utama UMKM di Indonesia masih berpusat pada minimnya akses terhadap permodalan yang memadai.

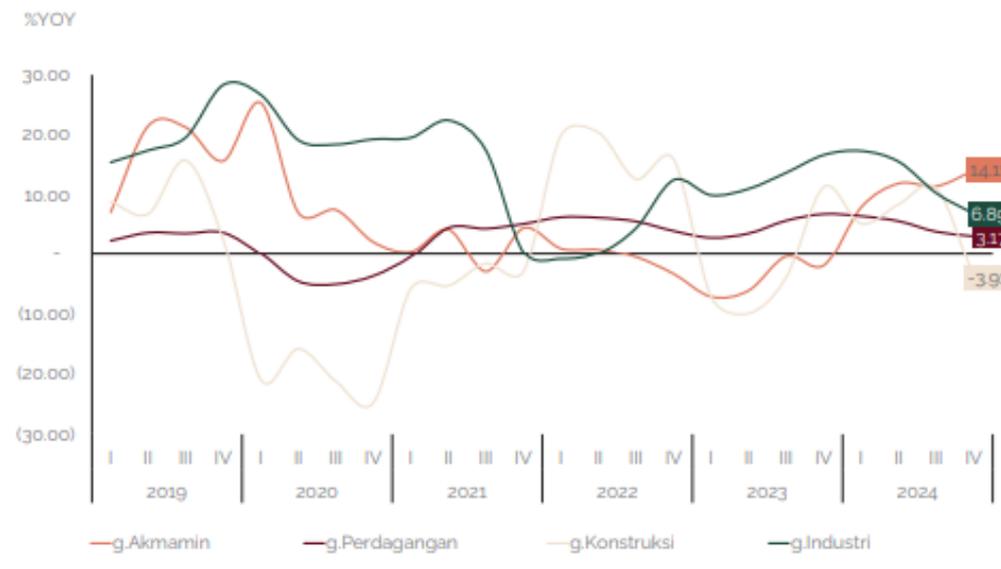
Hingga saat ini, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha. Banyak UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit usaha dari lembaga keuangan formal akibat faktor seperti kurangnya jaminan, rendahnya literasi keuangan, serta prosedur perbankan yang kompleks. Neeley dan Van Auken (2021) menambahkan bahwa keterbatasan ini menyebabkan banyak UMKM sulit

berkembang dan pada akhirnya mengalami kegagalan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali pada tahun 2022 mencapai 440.609 unit. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 439.382 unit, dengan selisih 1.227 unit atau sekitar 0,27% (DISKOPUKM.BALIPROV.GO.ID). Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tantangan ekonomi, perubahan regulasi, atau dinamika pasar yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Selain itu, keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi, serta persaingan yang makin ketat, juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Secara rinci, dari total 439.382 UMKM pada 2023, sebagian besar merupakan usaha mikro sebanyak 387.279 unit, diikuti oleh usaha kecil sebanyak 43.296 unit, dan usaha menengah sebanyak 11.273 unit. Meskipun terjadi penurunan secara absolut, data lain menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM yang telah terdaftar secara administratif. Hingga akhir 2023, tercatat sebanyak 442.848 UMKM di Bali, terdiri atas sektor formal sebesar 107.656 unit (24,31%) dan sektor informal sebesar 335.192 unit (75,69%).

Gambar 1 menampilkan tren pertumbuhan tahunan (YoY) kredit UMKM sektoral di Provinsi Bali selama periode 2019 hingga kuartal IV 2024, berdasarkan data dari Laporan Bank Umum yang dirilis Bank Indonesia. Grafik ini mencakup empat sektor utama, yaitu sektor akomodasi dan makanan/minuman, perdagangan, konstruksi, dan industri. Dari grafik tersebut, tampak bahwa sektor akomodasi dan makanan/minuman mengalami fluktuasi pertumbuhan yang paling signifikan. Setelah sempat berkontraksi tajam pada 2020 akibat pandemi COVID-19, sektor ini mencatat pemulihan kuat sejak 2021, dan pada kuartal IV 2024 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,11%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini menjadi salah satu motor pemulihan ekonomi Bali, seiring meningkatnya kembali aktivitas pariwisata.

Sektor perdagangan menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil meskipun sempat mengalami penurunan pada awal pandemi. Pada kuartal III 2024, sektor ini tumbuh sebesar 6,89%, mencerminkan daya tahan sektor ini dalam menghadapi dinamika ekonomi. Sektor konstruksi mengalami fluktuasi yang cukup dalam, bahkan sempat mengalami pertumbuhan negatif pasca-pandemi. Pada kuartal IV 2024, sektor ini tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,91%, yang menunjukkan masih adanya hambatan pemulihan di sektor ini, kemungkinan akibat penundaan proyek-proyek fisik dan investasi. Sementara itu, sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, meskipun cenderung moderat. Pada kuartal IV 2024, sektor industri mencatat pertumbuhan sebesar -1,37%, yang mengindikasikan perlunya dukungan tambahan untuk mendorong produktivitas sektor ini. Secara keseluruhan, tren kredit UMKM di Bali selama periode 2019–2024 mencerminkan dinamika pemulihan ekonomi yang tidak merata antar sektor. Pemulihan kuat di sektor akomodasi dan perdagangan menunjukkan adanya respons positif terhadap relaksasi kebijakan dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun, beberapa sektor seperti konstruksi dan industri masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga keuangan agar bisa berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah.



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia (diolah)

Gambar 1. Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral di Prov. Bali

Peningkatan jumlah kredit UMKM di Prov. Bali salah satunya disebabkan oleh adanya kehadiran lembaga penjamin kredit, yang membuat pembiayaan kredit menjadi lebih *bankable*. Salah satu lembaga penjamin kredit yang berperan dalam menjamin kredit UMKM di Bali adalah PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Eksistensi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) bertujuan untuk mengambil alih sementara risiko kegagalan pelunasan kredit atau pembiayaan yang diterima oleh pihak terjamin/terjamin (Bank Indonesia, 2024). Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) menjalin kerja sama (kemitraan) dengan berbagai lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan di Prov. Bali. Bentuk kerja sama ini menjadi jembatan antara visi pemerintah dalam sektor perekonomian Provinsi Bali dengan potensi usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Dengan adanya penjaminan kredit, permasalahan yang selama ini menghambat perkembangan UMKM, khususnya dalam hal pembiayaan, dapat diatasi. Produk-produk penjaminan yang ditawarkan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) mencakup Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Kredit Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa (KEPPRES), Penjaminan Kredit Linkage Program, Penjaminan Surety Bond, Penjaminan Garansi Bank atau Kontra Bank Garansi (KBG) dan Penjaminan Custom Bond.

Penjaminan kredit UMKM yang telah disalurkan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) mencakup berbagai sektor ekonomi, antara lain perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, serta jasa lainnya. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Desember 2024, jumlah terjamin yang dijamin oleh PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), baik untuk kredit produktif maupun kredit non-produktif, telah mencapai lebih dari 97.698 Terjamin dengan nilai penjaminan lebih dari Rp 6.156.598.488.470 (Jamkrida Bali, 2024). Penjaminan kredit yang disalurkan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terbagi menjadi dua sektor utama, yaitu sektor produktif dan sektor non-produktif. Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, sektor produktif mengalami pertumbuhan yang konsisten dalam hal plafon penjaminan maupun jumlah NOA (Number of

Accounts). Sementara itu, sektor non-produktif menunjukkan tren yang lebih fluktuatif dengan penurunan pada tahun 2023, sebelum akhirnya meningkat kembali pada tahun 2024.

Pada sektor produktif, plafon penjaminan meningkat dari Rp2.562.605.604.201 pada tahun 2022 menjadi Rp3.107.779.802.942 pada tahun 2023, dan terus bertambah hingga Rp3.621.397.928.655 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan bisnisnya. Selain itu, jumlah NOA juga mengalami pertumbuhan dari 53.716 akun pada tahun 2022 menjadi 56.473 akun pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 58.967 akun pada tahun 2024. Di sisi lain, sektor non-produktif mengalami dinamika yang berbeda. Pada tahun 2022, plafon penjaminan mencapai Rp2.260.621.703.163, tetapi mengalami penurunan menjadi Rp1.964.667.838.023 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, plafon penjaminan kembali meningkat menjadi Rp2.535.200.559.815. Penurunan pada tahun 2023 dapat mencerminkan kebijakan selektif dalam pemberian penjaminan pada sektor yang tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi langsung. Tren serupa juga terjadi pada jumlah NOA di sektor non-produktif. Pada tahun 2022, jumlah NOA tercatat sebanyak 38.097 akun, kemudian turun menjadi 35.804 akun pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 38.731 akun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah terjamin yang mendapatkan akses penjaminan di sektor ini, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan penjaminan serta kondisi ekonomi yang berkembang setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, pertumbuhan signifikan dalam plafon penjaminan dan jumlah NOA di sektor produktif menunjukkan bahwa PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) semakin fokus dalam mendukung pembiayaan usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, meskipun sektor non-produktif sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, pemulihan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penyesuaian strategi dalam pemberian penjaminan. Hal ini mengindikasikan bahwa PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terus berupaya menyesuaikan kebijakan penjaminan untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Untuk memahami perbandingan antara sektor produktif dan non-produktif secara lebih visual, berikut adalah grafik yang menggambarkan tren perbandingan plafon penjaminan dan jumlah NOA dari tahun 2022 hingga 2024 sebagai berikut :



Gambar 2. Perbandingan Plafon Penjaminan dan Jumlah NOA (Number of Accounts) pada Sektor Produktif Dan Non-Produktif dari Tahun 2022 Hingga 2024 (Sumber : PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda))

Plafon Penjaminan (garis biru untuk sektor produktif dan garis cyan putus-putus untuk sektor non-produktif) menunjukkan bahwa sektor produktif mengalami peningkatan yang konsisten dari Rp2,56 triliun pada 2022 menjadi Rp3,62 triliun pada 2024. Sebaliknya, sektor non-produktif mengalami penurunan pada 2023 sebelum kembali meningkat pada 2024. Jumlah NOA (garis merah untuk sektor produktif dan garis oranye putus-putus untuk sektor non-produktif) juga menunjukkan tren serupa. Jumlah NOA di sektor produktif terus meningkat, sedangkan sektor non-produktif mengalami penurunan pada 2023 sebelum kembali naik pada 2024. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa PT. Jamkrida Bali Mandara lebih fokus dalam meningkatkan penjaminan untuk sektor produktif, sementara sektor non-produktif mengalami fluktuasi dalam jumlah penjaminan dan NOA.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menyatakan bahwa potensi pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali masih sangat besar, termasuk melalui perbankan. Namun, hanya sebagian kecil dari UMKM yang memenuhi kriteria *bankable*. Pemerintah mendorong perbankan untuk lebih aktif menysasar pelaku UMKM agar mereka dapat memperoleh pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, peran lembaga penjaminan kredit sangat penting untuk membantu UMKM yang belum *bankable* dalam mengakses pendanaan eksternal. Keberadaan lembaga penjaminan kredit dirasakan masih diperlukan dan perlu dikembangkan dari sisi peran dan fungsinya. Peningkatan peran dan fungsi lembaga penjaminan kredit diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. swa.co.id

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan UMKM, OJK Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali telah menyelenggarakan acara 'Business Matching Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bali Nadi Jayanti Tahun 2024'. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan mitra usaha guna memperluas pemasaran produk mereka. Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menyampaikan bahwa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK telah memberikan literasi keuangan dan mendorong terbukanya akses keuangan kepada pelaku UMKM dan masyarakat secara masif. Program Bali Nadi Jayanti telah dijalankan sejak 2023 dan diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas. antaranews.com

Peran lembaga penjaminan kredit dalam mendukung UMKM sangat penting, terutama dalam mengurangi risiko bagi lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada UMKM. Lembaga penjaminan bertindak sebagai katalis yang memfasilitasi akses UMKM ke sumber permodalan dengan cara mengurangi risiko kredit bagi lembaga keuangan. Skema penjaminan kredit dapat membantu mengurangi hambatan kredit bagi UMKM dengan memitigasi risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman, sehingga meningkatkan kesediaan sektor perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. keuanganonline.id

Keberadaan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Prov. Bali. Dengan adanya jaminan kredit, UMKM dapat lebih mudah mengakses permodalan tanpa terbebani risiko tinggi. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha semakin memperkuat ekosistem UMKM di Prov. Bali. Diharapkan, dengan dukungan kebijakan yang terus berlanjut, sektor UMKM dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah (Bank Indonesia, 2024).

Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk menggali peranan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam kontribusi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dalam mendukung perkembangan UMKM di daerah tersebut. Tujuan penelitian ini meliputi beberapa aspek, salah satunya untuk mengetahui peranan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dalam meningkatkan kinerja UMKM di Provinsi Bali. Adapun ruang lingkup dalam kajian ini mencakup identifikasi peranan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terhadap peningkatan kinerja UMKM di Provinsi Bali. Ruang lingkup wilayah penelitian mencakup keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang memungkinkan hasil kajian ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

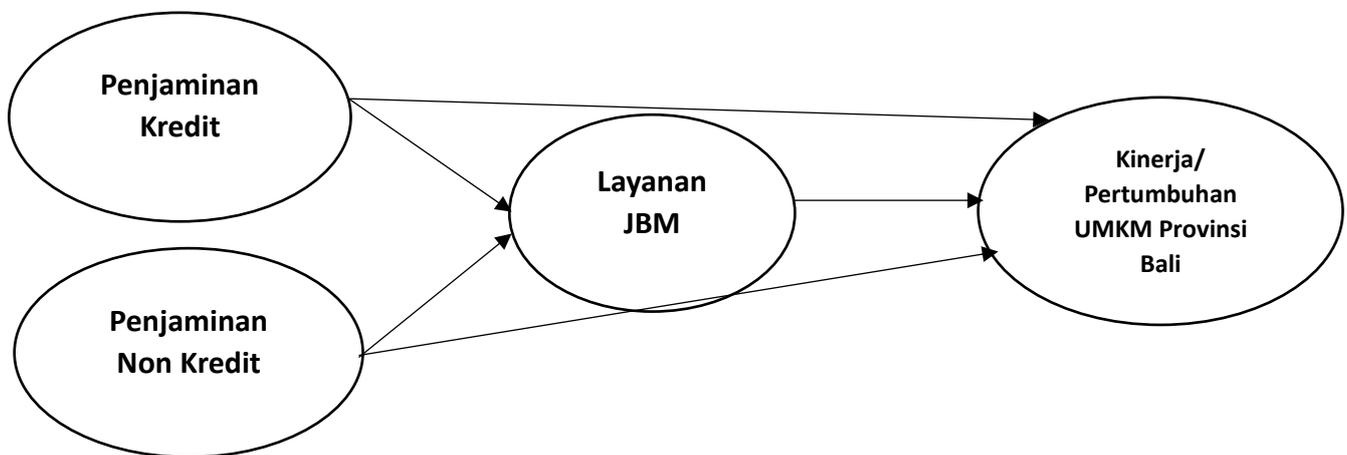
Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta kelembagaan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2020). Pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan pengurangan kesenjangan sosial (Sukirno, 2019). Hal ini mencerminkan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Indikator Pembangunan Ekonomi salah satu indikator utama dalam mengukur pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mencerminkan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu dan digunakan sebagai parameter dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara (Mankiw, 2021). Kenaikan PDB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, sedangkan stagnasi atau penurunan PDB mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Friedman (2021), UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta menjadi penopang perekonomian di saat terjadi krisis ekonomi. Studi oleh Harapan (2014) juga menegaskan bahwa UMKM lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan usaha besar, karena memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan pasar. Meskipun memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses permodalan. Neeley dan Van Auken (2021) menyoroti bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi UMKM adalah sulitnya mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal akibat kurangnya jaminan, rendahnya literasi keuangan, serta prosedur perbankan yang kompleks. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian *Interactive Crew* (2019) dan Permiana (2020) yang menunjukkan bahwa akses permodalan masih menjadi tantangan utama bagi UMKM di Indonesia.

Lembaga penjamin kredit memiliki peran penting dalam membantu UMKM mengakses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Salah satu lembaga yang berperan dalam mendukung UMKM di Provinsi Bali adalah PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Lembaga ini berfungsi sebagai penjamin risiko bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM (Bank Indonesia, 2024). Keberadaan lembaga penjamin kredit ini memungkinkan UMKM yang belum memenuhi kriteria *bankable* untuk tetap mendapatkan akses ke pendanaan.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2024), terdapat peningkatan jumlah kredit UMKM di Bali dalam beberapa tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh adanya dukungan dari lembaga penjamin kredit seperti PT. Jamkrida Bali Mandara. Tren pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Bali menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi nasional dan global, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan melalui berbagai kebijakan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kemitraan dengan lembaga penjamin kredit. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah telah menginisiasi berbagai program, seperti Business Matching UMKM Bali Nadi Jayanti, untuk membantu UMKM mendapatkan akses pasar dan pendanaan yang lebih luas. Keberlanjutan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, hubungan tersebut dijelaskan melalui ilustrasi kerangka berpikir yang disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 3 Kerangka Berpikir Peranan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dalam meningkatkan kinerja UMKM di Provinsi Bali

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah, dan teori-teori yang mendukung tentang penjaminan kredit, penjaminan non kredit, layanan JBM dan kinerja/pertumbuhan UMKM Provinsi Bali maka akan dapat meningkatkan minat berwirausaha, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1:** Penjaminan kredit berpengaruh positif terhadap Layanan JBM
- H2:** Penjaminan Non kredit secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Layanan JBM
- H3:** Penjaminan Kredit Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja/Pertumbuhan UMKM Prov Bali
- H4:** Penjaminan Non Kredit Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja/Pertumbuhan UMKM Prov Bali
- H5:** Layanan JBM Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja/ Pertumbuhan UMKM Prov Bali

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Prov Bali. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:85), purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih karena tidak semua populasi memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sampel ditentukan secara sengaja agar lebih representatif. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Terjamin UMKM pada sektor produktif PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tahun 2024 berjumlah 58.967. Metode pemilihan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun jumlah sampel minimum yang ditentukan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = margin error

Level of significance yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 0,05 diharapkan bahwa besarnya kesalahan dalam penggunaan sampel (kesalahan sampling) tidak lebih dari 10 persen. Dengan rumus diatas jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut :

$$n = \frac{58.967}{1 + 58.967 (0,1)^2} = 99,83$$

n = 99,83 dibulatkan menjadi 100

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah minimum sampel yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah 100 Terjamin UMKM pada sektor produktif PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tahun 2024 yang tersebar secara proporsional di 9 kabupaten/kota dalam wilayah Prov. Bali. Metode pengambilan sampel yang digunakan *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dengan kriteria terjamin dalam penelitian ini meliputi :

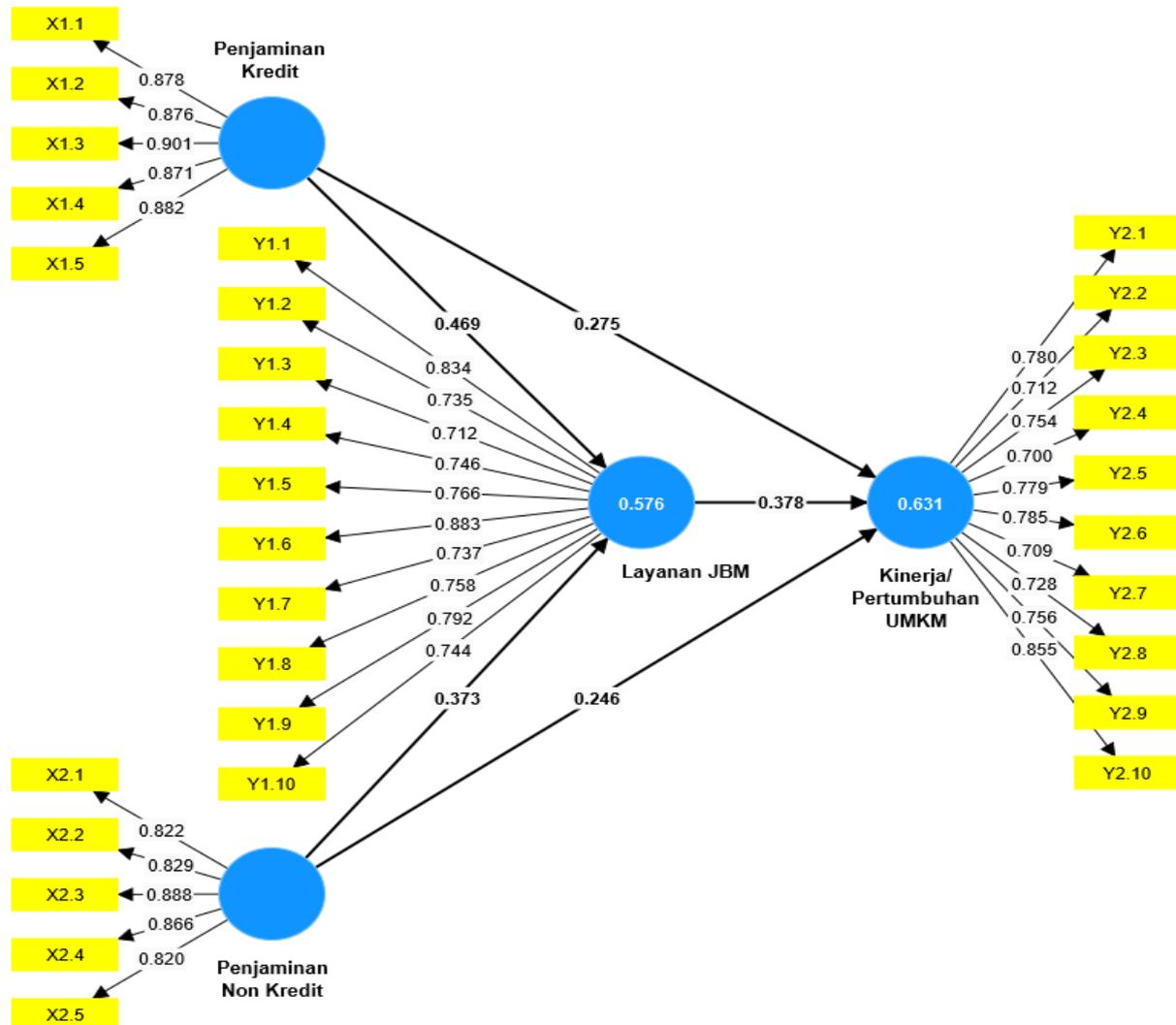
1. Terjamin UMKM yang masih aktif dalam masa kredit PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) pada wilayah daerah Provinsi Bali
2. Mengikuti program penjaminan kredit pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Seluruh data yang diperoleh dari hasil distribusi kuesioner dinyatakan valid untuk digunakan dan selanjutnya dianalisis menggunakan software SmartPLS versi 4.0.

Hasil Dan Pembahasan

Tujuan dilakukannya evaluasi model pengukuran untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator-indikator pada setiap variabel. Variabel yang terdapat pada

penelitian ini yaitu tiga variabel laten, yaitu penjaminan kredit (X_1), penjaminan non kredit (X_2), Layanan JBM (Y_1), dan Kinerja/ Pertumbuhan UMKM Prov Bali (Y_2) berperan sebagai model pengukuran dengan indikator reflektif. Oleh karena itu, penilaian model pengukuran mencakup tinjauan validitas diskriminan dan konvergen indikator di samping reliabilitas gabungan blok indikator. Gambar 4 di bawah ini menampilkan temuan analisis model eksternal studi ini:



Gambar 4 Outer Model

Tingkat kesesuaian pengukuran dengan pengukuran lain dari sebuah konstruk yang sama dijelaskan oleh uji validitas konvergen. Harapannya nilai Average Variance Extracted (AVE) akan lebih tinggi dari 0,5 dan nilai faktor pemuatan pada variabel laten akan lebih dari 0,7. Menurut kriteria empiris, validitas diskriminan menjelaskan seberapa besar konstruk tersebut berbeda dari konstruk lainnya. Konstruk yang dimaksud harus memiliki nilai faktor pemuatan yang lebih tinggi daripada nilai faktor pemuatan konstruk lainnya. Hal ini dicapai dengan membandingkan nilai loading faktor (Ghozali, 2018). Metode alternatif untuk menguji validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE) dari setiap konstruk dengan korelasi antara variabel laten.

Tabel 1. Nilai Outer Loading

	Kinerja/Pertumbuhan UMKM	Layanan JBM	Penjaminan Kredit	Penjaminan Non Kredit
X1.1	0,607			
X1.2	0,561			
X1.3	0,650			
X1.4	0,583			
X1.5	0,639			
X2.1		0,629		
X2.2		0,508		
X2.3		0,537		
X2.4		0,611		
X2.5		0,495		
Y1.1			0,524	
Y1.2			0,605	
Y1.3			0,522	
Y1.4			0,500	
Y1.5			0,572	
Y1.6			0,631	
Y1.7			0,534	
Y1.8			0,507	
Y1.9			0,537	
Y1.10			0,463	
Y2.1				0,609
Y2.2				0,591
Y2.3				0,492
Y2.4				0,375
Y2.5				0,502
Y2.6				0,637
Y2.7				0,371
Y2.8				0,398
Y2.9				0,493
Y2.10				0,500

Sumber: Hasil pengolahan data (2025)

Berdasarkan tabel 2, hasil analisis validitas konvergen memberikan informasi bahwa setiap indikator pada masing-masing konstruk penelitian telah memperoleh nilai *loading factor* di atas 0,7.

Tabel 2. Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Hasil Average Variance Extracted (AVE)
Penjaminan kredit (X ₁)	0.777
Penjaminan non kredit (X ₂)	0.715
Program Layanan JBM (Y ₁)	0.597
Kinerja/ Pertumbuhan UMKM Prov Bali (Y ₂)	0.573

Sumber: Hasil pengolahan data (2025)

Berdasarkan Tabel 3 dari hasil uji validitas melalui nilai AVE menunjukkan bahwa setiap indikator pada setiap variabel laten pada penelitian ini yang mencakup penjaminan kredit, penjaminan non kredit, Layanan JBM, dan Kinerja/ Pertumbuhan UMKM Prov Bali telah memperoleh nilai AVE diatas nilai yang diharapkan yaitu 0,5. Maka dari itu, dapat dikatakan variabel yang digunakan telah memenuhi uji validitas konvergen dengan baik.

Tabel 3. Hasil Cross Loading

	Kinerja/Pertumbuhan		Penjaminan Non	
	UMKM	Layanan JBM	Penjaminan Kredit	Kredit
X1.1	0,607	0,648	0,878	0,565
X1.2	0,561	0,599	0,876	0,510
X1.3	0,650	0,628	0,901	0,605
X1.4	0,583	0,571	0,871	0,475
X1.5	0,639	0,635	0,882	0,565
X2.1	0,637	0,629	0,700	0,822
X2.2	0,578	0,508	0,493	0,829
X2.3	0,489	0,537	0,459	0,888
X2.4	0,589	0,611	0,502	0,866
X2.5	0,498	0,495	0,422	0,820
Y1.1	0,719	0,834	0,524	0,554
Y1.2	0,588	0,735	0,605	0,473
Y1.3	0,480	0,712	0,522	0,545
Y1.4	0,599	0,746	0,500	0,523
Y1.5	0,497	0,766	0,572	0,492
Y1.6	0,641	0,883	0,631	0,585
Y1.7	0,472	0,737	0,534	0,530
Y1.8	0,517	0,758	0,507	0,456
Y1.9	0,614	0,792	0,537	0,469
Y1.10	0,483	0,744	0,463	0,494
Y2.1	0,780	0,596	0,653	0,609
Y2.2	0,712	0,591	0,544	0,591
Y2.3	0,754	0,535	0,474	0,492
Y2.4	0,700	0,529	0,453	0,375
Y2.5	0,779	0,599	0,506	0,502
Y2.6	0,785	0,557	0,514	0,637
Y2.7	0,709	0,455	0,509	0,371
Y2.8	0,728	0,507	0,444	0,398
Y2.9	0,756	0,562	0,512	0,493
Y2.10	0,855	0,589	0,584	0,500

Sumber: Hasil pengolahan data (2025)"

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa hasil uji validitas melalui analisis output cross loading dapat dijelaskan. Dibandingkan dengan nilai korelasi indikator dengan konstruksi lainnya, setiap variabel indikator mempunyai nilai korelasi indikator yang lebih besar pada konstruksinya sendiri.

Tabel 4. Hasil Fornell-Larcker Criterion

	Kinerja/Pertumbuhan UMKM	Layanan JBM	Penjaminan Kredit	Penjaminan Non Kredit
Kinerja/Pertumbuhan UMKM Prov Bali	0,757			
Layanan JBM	0,733	0,772		
Penjaminan Kredit	0,691	0,700	0,882	
Penjaminan Non Kredit	0,666	0,664	0,619	0,845

Sumber: Hasil pengolahan data (2025)

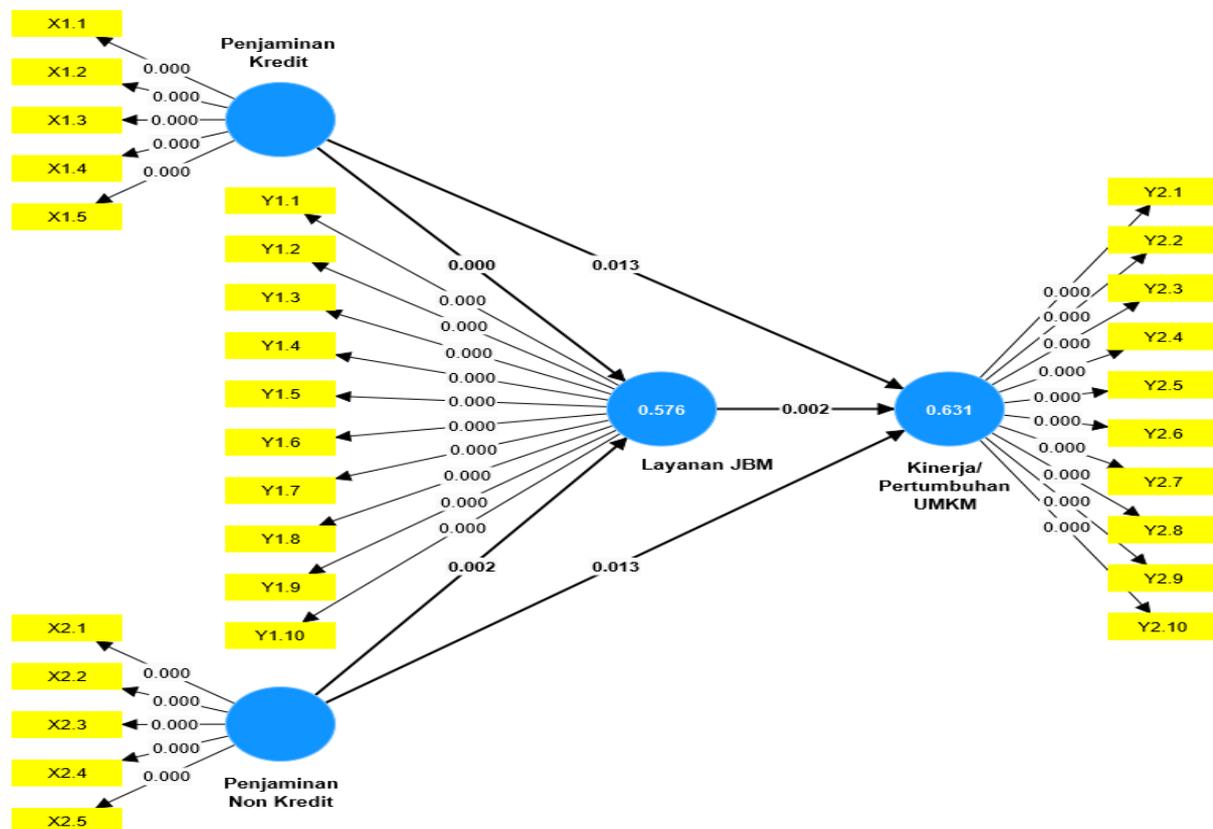
Berdasarkan Tabel 5, nilai akar kuadrat AVE yang diperoleh lebih tinggi daripada korelasi antar variabel laten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah memenuhi kriteria validitas diskriminan yang baik. Salah satu teknik untuk mengevaluasi ketepatan, konsistensi, dan ketepatan pengukuran model penelitian adalah pengujian reliabilitas. Ada dua cara untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini: *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability*. Pengujian *reliabilitas Cronbach's alpha* mengharuskan nilai *Composite Reliability* lebih tinggi dari 0,7, yang menunjukkan reliabilitas yang kuat untuk konsep penelitian (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Uji Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Penjaminan kredit (X ₁)	0.930
Penjaminan non kredit (X ₂)	0.904
Program Layanan JBM (Y ₁)	0.928
Kinerja/ Pertumbuhan UMKM Prov Bali (Y ₂)	0.920

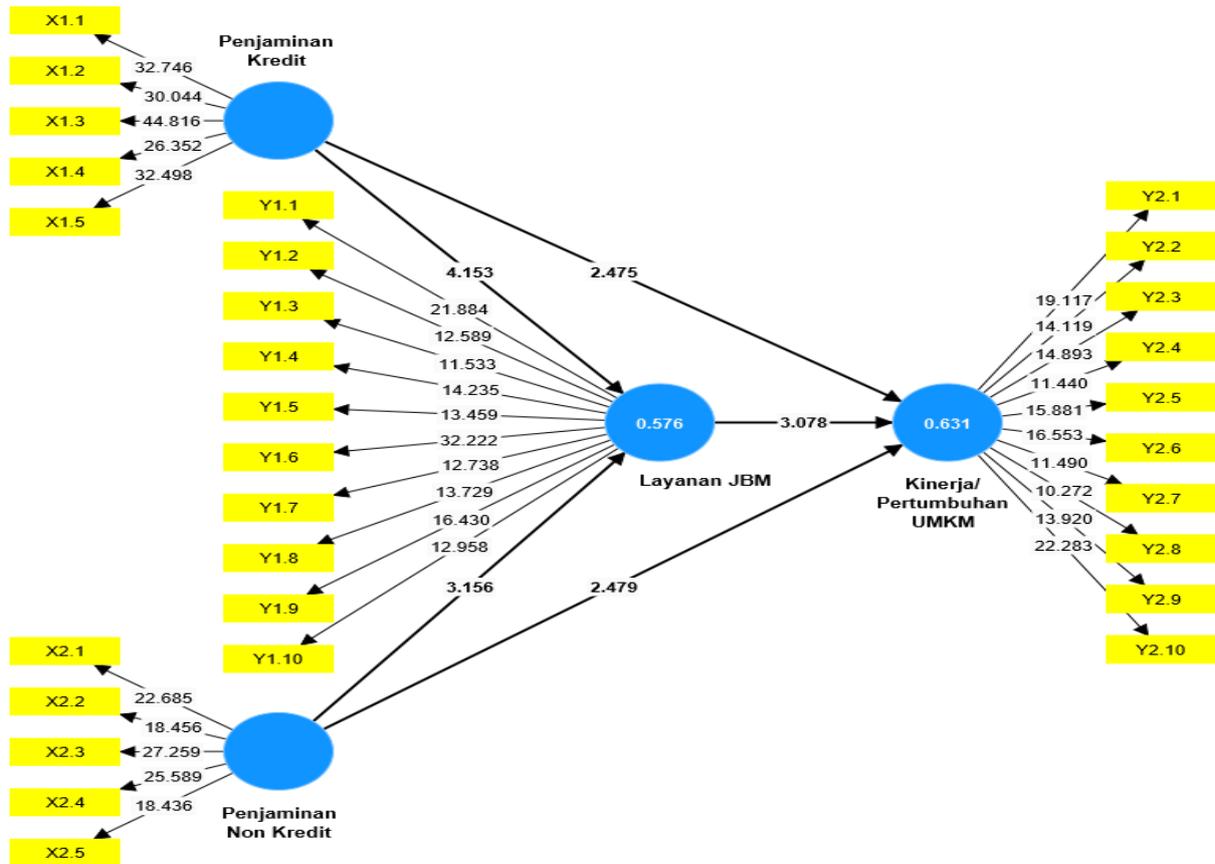
Sumber: Hasil pengolahan data (2025)"

Dari Tabel 6, terlihat jelas bahwa semua butir pertanyaan penelitian telah memenuhi standar reliabilitas karena nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* dari keempat variabel laten telah berada di atas 0,70. Berdasarkan analisis PLS, gambar model penelitian berikut ini menampilkan hasil analisis yang telah dilakukan beserta perhitungan yang berkaitan dengan hasil uji outer loading dan analisis jalur :



Gambar 5. Outer Loading dan Path Analysis Hasil Estimasi

Sementara itu, Gambar 6 menampilkan hasil perhitungan yang berkaitan dengan hasil uji signifikansi (pengikatan stan).



Gambar 6. Bootstrapping (Uji Statistik)

Tabel 7 di bawah ini menampilkan temuan uji validasi koefisien jalur untuk setiap jalur untuk pengaruh dan efek langsung.

Tabel 6. Path Analisis dan Pengujian Statistik

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Penjaminan Kredit -> Layanan JBM	0,469	0,472	0,113	4,153	0,000
Penjaminan Non Kredit -> Layanan JBM	0,373	0,372	0,118	3,156	0,002
Penjaminan Kredit -> Kinerja/Pertumbuhan UMKM	0,275	0,281	0,111	2,475	0,013
Penjaminan Non Kredit -> Kinerja/Pertumbuhan UMKM	0,246	0,242	0,099	2,479	0,013
Layanan JBM -> Kinerja/Pertumbuhan UMKM Prov Bali	0,378	0,375	0,123	3,078	0,002

Sumber: Hasil pengolahan data (2025)"

Berdasarkan informasi pada Tabel 7, penjaminan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Layanan JBM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur positif memberikan nilai 0,469, dengan t-statistik 4,153 (t-statistik > 1,96) dan nilai P 0,000 < 0,05. Maka, apabila penjaminan kredit semakin baik, Layanan JBM akan meningkat juga.

Penjaminan non kredit pun menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap Layanan JBM. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif sebesar 0,373 dengan t-statistik sebesar 3,156 (t-statistik > 1,96) dan nilai P sebesar 0,002 < 0,05. Ini menunjukkan semakin baik penjaminan non kredit, semakin meningkat layanan JBM.

Penjaminan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja/Pertumbuhan UMKM Prov Bali. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur positif memberikan nilai 0,275, dengan t-statistik 2,475 (t-statistik > 1,96) dan nilai P 0,013 < 0,05. Maka, apabila penjaminan kredit semakin baik, Kinerja/Pertumbuhan UMKM Prov Bali akan meningkat juga.

Penjaminan non kredit pun menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap Kinerja/Pertumbuhan UMKM Prov Bali. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif sebesar 0,246 dengan t-statistik sebesar 2,479 (t-statistik > 1,96) dan nilai P sebesar 0,013 < 0,05. Ini menunjukkan semakin baik penjaminan non kredit, semakin meningkat Kinerja/Pertumbuhan UMKM Prov Bali.

Program Layanan JBM menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap Kinerja/ Pertumbuhan UMKM Prov Bali. Melihat koefisien jalur positif sebesar 0,378 dengan t-statistik 3,078 (t-statistik > 1,96) dan nilai P sebesar 0,002 < 0,05. Artinya, semakin baik program Layanan JBM yang diikuti oleh UMKM, semakin meningkat pula Kinerja/ Pertumbuhan UMKM Prov Bali.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit oleh PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap layanan JBM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik program penjaminan yang diberikan, maka semakin meningkat pula kualitas dan jangkauan layanan lembaga tersebut. Selain itu, penjaminan non-kredit juga memberikan pengaruh signifikan terhadap layanan JBM, yang berarti berbagai layanan jaminan di luar pembiayaan, seperti *surety bond*, kontra bank garansi, dan lainnya turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Penjaminan kredit dan non-kredit secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM, terutama dalam aspek akses terhadap modal, perluasan usaha, dan ketahanan bisnis. Layanan JBM yang efektif juga berpengaruh positif terhadap kinerja atau pemulihan UMKM, yang menandakan bahwa tidak hanya aspek permodalan yang penting, namun kemudahan layanan dan sistem pendampingan yang diberikan oleh Jamkrida Bali juga menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Untuk meningkatkan dampak peranan PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terhadap kinerja UMKM di Provinsi Bali, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlunya penguatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan literasi keuangan serta pemahaman terhadap manfaat program penjaminan kredit, sehingga lebih banyak pelaku usaha yang dapat memanfaatkannya secara optimal. Kedua, pengembangan layanan digital dan inklusif perlu dilakukan agar skema penjaminan menjangkau sektor-sektor non-konvensional dan pelaku UMKM yang belum memenuhi kriteria bankable. Ketiga, diperlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, perbankan,

OJK, dan Jamkrida Bali dalam membentuk ekosistem pembiayaan berbasis data yang terintegrasi untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara menyeluruh. Keempat, penting untuk membentuk sistem monitoring dan evaluasi secara berkala guna menilai efektivitas program penjaminan serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan UMKM di lapangan. Dengan demikian, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) diharapkan dapat terus memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi kasus pada kelompok usaha 'Emping Jagung' di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Arbanu, M. (2020). *Pengaruh Demografi, Kredit Bank, Sistem Akuntansi Laporan Keuangan dan Standar Akuntansi UMKM terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Tegal* (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal).
- Arif, M. W., & Umajah, S. (2018). Pengaruh rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja terhadap persentase penduduk miskin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 28(1), 22–41.
- Asmawanti, T., & Supriyono. (2015). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Masyarakat Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bank Indonesia. (2015). *Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.
- Friedman, J. (2021). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.
- Ghozali, I. (2018). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)* (Edisi 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunartin. (2017). Penguatan UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, 2(2), 1–8.
- Hamid, S. (2011). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45–55.
- Harahap, E. F. (2020). Tinjauan defisit fiskal, ekspor, impor dan jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 137–148.
- Harapan, Y. R. (2014). *Dinamika UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Potensi UMKM mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Diakses dari: <https://linkumkm.id/news/detail/11150/potensi-umkm-mendorong-pembangunan-ekonomi-di-indonesia>.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. Diakses dari: <http://umkm.depkop.go.id/>
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics* (11th ed.). Worth Publishers.
- Neeley, L., & Van Auken, H. (2021). *Small Business Management: Launching & Growing Entrepreneurial Ventures*. Cengage Learning.
- Permana, H. (2020). *Analisis Kendala UMKM dalam Akses Permodalan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Rahayu, S. (2020). *Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.

Sumber Online Lainnya:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx?Kategori=bali&Periode=>
<https://diskopukm.baliprov.go.id/>
<https://jamkridabali.co.id/>
<https://keuanganonline.id/analisis/peran-dan-tantangan-penjaminan-kredit-dalam-memajukan-sektor-umkm/>
<https://www.antaranews.com/berita/4436221/ojk-bali-bantu-perluas-akses-pasar-pelaku-umkm>
<https://swa.co.id/read/452603/ojk-dan-pemprov-bali-bersinergi-tingkatkan-pemberdayaan-umkm-bali>